

ANALISIS POTENSI DAN TANTANGAN DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI DESA

M. Isra¹, Salahuddin²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Malang
e-mail: mhd.isra28@gmail.com

Abstrak, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan tantangan dalam upaya pengentasan kemiskinan di desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (Library Research). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah metode analisis isi (Content Analysis) yang diolah menggunakan software Nvivo 12 plus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otonomi desa merupakan potensi yang memiliki pengaruh yang paling dominan dari empat faktor dalam upaya pengentasan kemiskinan. Sedangkan pada faktor tantangan, sumber daya manusia merupakan faktor yang paling dominan berpengaruh dalam upaya pengentasan kemiskinan di desa. Kemudian, keempat faktor potensi menunjukkan adanya korelasi satu sama lain. aspek dukungan pemerintah dan otonomi desa memiliki tingkat korelasi yang sangat kuat. Dan pada keempat faktor tantangan juga memiliki korelasi satu sama lainnya. Faktor Sumber Daya Manusia menunjukkan korelasi yang paling tinggi. Hasil penelitian juga menunjukkan keterlibatan aktor, diantaranya LSM, Pemerintah, Pengamat, dan Pengusaha. Hasil analisis data didapatkan bahwa pemerintah dan pengamat merupakan aktor yang paling berdominasi dalam pengentasan kemiskinan di desa. Adapun pada faktor tantangan didapatkan bahwa pemerintah merupakan aktor yang menunjukkan dominasi paling tinggi.

Kata kunci : Potensi, Tantangan, Pengentasan Kemiskinan

Abstract, This study aims to analyze the potential and challenges in poverty alleviation efforts in the village. The method used in this research is a qualitative research with a literature study approach (Library Research). The data analysis technique used in this research is the method of content analysis which is processed using Nvivo 12 plus software. The results showed that village autonomy is the potential that has the most dominant influence of the four factors in poverty alleviation efforts. While on the challenge factor, human resources are the most dominant factor influencing poverty alleviation efforts in the village. Then, the four potential factors show a correlation with each other. aspects of government support and village autonomy have a very strong correlation. And the four challenge factors also have a correlation with each other. The Human Resources Factor shows the highest correlation. The results of the study also show the involvement of actors, including NGOs, the government, observers, and entrepreneurs. The results of data analysis show that the government and observers are the most dominant actors in alleviating poverty in the village. As for the challenge factor, it was found that the government was the actor who showed the highest dominance.

Keywords: Potential, Challenges, Poverty Alleviation.

Pendahuluan

Masalah kemiskinan hingga saat ini terus menjadi dilema. Oleh sebab itu, Kemiskinan merupakan pemasalahan pokok untuk segera dituntaskan. Kemiskinan adalah fakta yang selalu muncul dalam budaya manusia. Kemiskinan belum menjadi konsep yang sah (*legitimate*) dalam tradisi ilmiah karena begitu banyak ragam dan kriteria untuk menentukannya (Iskandar et al., 2010: 123).

Program-program pembangunan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah menarik perhatian terhadap upaya pengentasan kemiskinan, namun belum memberikan perubahan yang signifikan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode maret 2011 hingga september 2021 mengalami penurunan hingga berada pada angka 9 hingga 10 persen. Jumlah penduduk miskin yang tercatat pada september 2021 mencapai 26,5 juta jiwa atau dengan presentase 9,71%. Dibandingkan pada periode maret 2021, menurun 1,40 juta orang atau 0,43%. Sementara dibandingkan pada september 2021 mengalami penurunan sebesar 1,05 juta jiwa atau 0,48% (Badan Pusat Statistik, 2022).

Tingkat kemiskinan juga banyak terjadi di daerah pedesaan karena banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Berikut perkembangan tingkat kemiskinan di daerah pedesaan pada September 2020-September 2021.



Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2022) (data diolah)

Berdasarkan data diatas, bahwa tingkat kemiskinan di daerah pedesaan pada September 2020-September 2021 mengalami penurunan sebanyak 0,73 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin pada September 2021 tercatat sebanyak 14,64 juta jiwa. Berdasarkan angka tersebut, maka presentase penduduk miskin di daerah pedesaan mengalami penurunan dari 13,20 persen menjadi 12,53 persen atau turun 0,67 persen jika dibandingkan pada September 2020. Tahun 2021 juga menjadi anomali ketika pandemi

Covid-19 masih melanda Indonesia, sehingga kondisi tersebut menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan khususnya di daerah pedesaan. Kondisi tersebut juga diperkirakan akan berlanjut hingga 1-2 tahun ke depan akibat resesi yang memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menambah beban pemerintah dalam menekan tingginya angka kemiskinan.

Upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah diaplikasikan melalui berbagai kebijakan dan program, baik yang bersifat secara langsung maupun tidak langsung. Kebijakan yang sifatnya langsung, misalnya program bantuan langsung tunai (BLT) dan program pengalokasian beras untuk masyarakat miskin (Raskin). Adapun kebijakan yang bersifat tidak langsung, seperti program kartu jamkesmas, Indonesia Pintar, Indonesia Sehat dan lain sebagainya. Dari berbagai rangkaian program penanggulangan kemiskinan yang ada tersebut, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah pada umumnya bersifat sementara (temporer). Maksudnya, program akan berjalan selama ada anggaran (dana) dan setelah dana itu habis, maka kegiatan program akan dihentikan. Dengan kata lain, program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan selama ini lebih didasarkan pada pendekatan proyek, bukan pada pendekatan program. Mengingat program penanggulangan kemiskinan yang tidak berkelanjutan tersebut, tidak mengherankan angka kemiskinan absolut di Indonesia pada akhirnya tetap tinggi (Murdiyana & Mulyana, 2017: 91).

Melihat kondisi tersebut, upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah cenderung mengarah pada kekeliruan paradigma sehingga dalam pelaksanaannya tidak bersifat jangka panjang. Sebagaimana menurut Huraerah (dalam Prawoto, 2009: 62), bahwa kekeliruan paradigma tersebut, diantaranya sebagai berikut.

- a) Upaya penanggulangan kemiskinan lebih berfokus pada aspek ekonomi daripada aspek multidimensi lainnya sehingga penanggulangan kemiskinan dengan fokus pada sisi ekonomi mengalami kegagalan. Hal ini karena penanggulangan kemiskinan yang direduksi menjadi masalah ekonomi, tidak mewakili masalah ekonomi yang sesungguhnya. Dalam konteks budaya, masyarakat miskin ditandai oleh nilai-nilai yang melembaga seperti ketidakpedulian, non-politik, fatalistik dan tidak berdaya. Kemudian dalam konteks struktural atau politik, mereka yang terkena dampak kemiskinan secara ekonomi pada dasarnya disebabkan oleh menguatnya kepentingan struktural dan politik.
- b) Lebih bernuansa karitatif (kemurahan hati) daripada produktivitas. Penanggulangan kemiskinan jika hanya berdasarkan filantropi, tidak akan mendorong orang miskin untuk berusaha bagaimana mengatasi kemiskinannya sendiri. Sehingga mereka akan selalu mengharapkan bantuan yang diberikan orang lain. Karena itu, program penanggulangan kemiskinan disisi lain perlu dirancang agar masyarakat menjadi lebih produktif.
- c) Masyarakat miskin diposisikan sebagai objek, bukan sebagai subjek perubahan dalam segala aktivitas program pengentasan kemiskinan.
- d) Pemerintah masih bertindak sebagai penguasa daripada fasilitator. Pemerintah yang bertindak sebagai penguasa seringkali terlalu luas turut mencampuri kehidupan masyarakat miskin. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya bertindak sebagai

fasilitator yang tugasnya mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat miskin. Dalam hal ini, bahwa upaya penanggulangan kemiskinan lebih menekankan “apa yang dimiliki orang miskin” daripada “apa yang tidak dimiliki orang miskin”. Dengan demikian, potensi yang dimiliki masyarakat miskin tersebut dapat berupa aset personal dan aset sosial, serta berbagai strategi penanganan masalah (*coping strategies*) yang telah diterapkan secara lokal.

Menurut Itang, (2015: 2) bahwa miskin adalah suatu keadaan seseorang yang mengalami kekurangan atau tidak mampu memenuhi tingkat hidup yang paling rendah serta tidak mampu mencapai tingkat minimal dari tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan tersebut dapat berupa konsumsi, kebebasan, hak mendapatkan sesuatu, menikmati hidup dan lain-lain. Dengan demikian, kemiskinan juga diartikan suatu keadaan dimana seseorang tidak mampu mencapai tujuan-tujuan yang diinginkannya. Sedangkan menurut (Yacoub, 2012: 180) menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar, karena kemiskinan dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Dan kemiskinan merupakan masalah global, karena kemiskinan merupakan masalah yang banyak dihadapi oleh negara. Kemiskinan juga merupakan problema kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan dan peradaban, sehingga semua orang sepakat bahwa kemiskinan harus ditanggulangi.

Para ahli juga berpendapat, bahwa kemiskinan bersifat multidimensional. Dengan kata lain, kemiskinan memiliki banyak aspek disebabkan karena tingkat kebutuhan masyarakat bermacam-macam. Dalam hal ini sebagaimana menurut Chambers, menguraikan kemiskinan dengan konsep yang luas yang mencakup dua belas dimensi yang saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain, diantaranya: (1) Dimensi pendidikan/kemampuan; (2) Dimensi institusi dan akses; (3) Dimensi waktu; (4) Dimensi musim; (5) Dimensi tempat tinggal/ lokasi; (6) Dimensi keamanan; (7) Dimensi ketidakmampuan fisik, (8) Dimensi material; (9) Dimensi hubungan social; (10) Dimensi hukum; (11) Dimensi kekuasaan politik; dan (12) Dimensi informasi (Amalia, 2015: 312).

Kemiskinan juga bersifat kompleks. Karena itu, menurut Harniati sebagaimana dikutip (dalam Bhinadi, 2017: 9-10) mengklasifikasikan kemiskinan dalam tiga jenis, yaitu :

- a) Kemiskinan alamiah, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia yang rendah. Kondisi alam dan kualitas sumber daya manusia yang minim membuat peluang hasil produksi juga rendah. Misalnya disektor pertanian, kemiskinan yang terjadi diakibatkan kualitas lahan dan kondisi akibat perubahan iklim yang tidak mendukung dapat menyebabkan rendahnya hasil produksi masyarakat yang pada akhirnya menyebabkan kemiskinan.
- b) Kemiskinan kultural, berkaitan dengan sikap atau keadaan seseorang atau kelompok di dalam masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki kondisi kehidupannya. Kemiskinan ini juga timbul karena adanya pengaruh dalam tradisi masyarakat, seperti sistem pewarisan dan pembagian lahan yang mengakibatkan kepemilikan lahan oleh keluarga semakin lama menjadi semakin sedikit.
- c) kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan secara langsung ataupun

tidak langsung oleh tatanan kelembagaan atau struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini, kebijakan yang ditumuskan oleh pemerintah cenderung mendorong sebagian besar masyarakat jatuh kedalam kemiskinan sehingga kondisi tersebut mengakibatkan masyarakat kesulitan bahkan tidak dimilikinya akses terhadap sumber daya pembangunan yang ada. Dengan demikian, kemiskinan struktural hanya mampu diatasi jika terjadi perubahan struktural yang mendasar oleh masyarakat.

Persoalan kemiskinan pada umumnya banyak terjadi di negara-negara berkembang, sehingga masalah tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjad penyebabnya sehingga menyulitkan dan menghambat negara berkembang untuk maju. Menurut World Bank dikutip (dalam Annur, 2013: 411), bahwa salah satu penyebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, tingkat kesehatan, dan pendidikan yang memadai (*acceptable*). Selain itu, kemiskinan juga berkaitan dengan terbatasnya kesempatan pekerjaan dan umumnya mereka yang dikategorikan miskin (*the poor*) adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan pada umumnya kurang memadai.

Sementara, Tulus berpendapat bahwa faktor-faktor penyebab kemiskinan di Indonesia adalah tingkat pendidikan yang rendah, produktivitas tenaga kerja rendah, tingkat upah yang rendah, distribusi pendapatan yang timpang, kesempatan kerja yang kurang, kualitas sumberdaya alam masih rendah, penggunaan teknologi masih kurang, etos kerja dan motivasi pekerja yang rendah, kultur/budaya (tradisi), dan politik yang belum stabil. Faktor tersebut saling mempengaruhi dan sulit untuk mengidentifikasi penyebab utama kemiskinan yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung. Sehingga dari semua faktor tersebut merupakan lingkaran setan (*vicious circle*) yang menjadi penyebab munculnya kemiskinan (Annur, 2013: 415).

Berikutnya, Adisasmita (dalam Dewi, 2017: 874) menguraikan indikator-indikator yang secara umum digunakan untuk mengukur kemiskinan adalah tingkat upah, jumlah pendapatan, konsumsi, kematian balita, imunisasi, gizi buruk, angka kelahiran, angka kematian ibu, angka harapan hidup, tingkat penyerapan anak sekolah dasar, tingkat pendanaan pemerintah dalam pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, pemenuhan bahan pangan (kalori/protein), sanitasi, pertumbuhan penduduk, melek huruf, urbanisasi, pendapatan per kapita, dan distribusi pendapatan. Di lain sisi, tolok ukur kemiskinan juga bukan hanya hidup dalam kekurangan pangan dan tingkat pendapatan yang rendah, tetapi juga memperhatikan tingkat kesehatan, pendidikan dan perlakuan adil dihadapan hukum, dan lain sebagainya. Hal ini sejalan dengan pendapat Yacoub, (2012: 178) bahwa kemiskinan tidak selamanya hanya bisa dipandang dari satu sisi rendahnya pendapatan, tetapi harus memperhatikan banyak aspek yang saling mendukung dan berhubungan satu sama lainnya sehingga kemiskinan bersifat multidimensi.

Upaya penanggulangan dalam memutus lingkaran kemiskinan membutuhkan analisis yang mendalam dengan melihat secara menyeluruh komponen permasalahan sehingga dapat menentukan model strategi penanggulangan efektif dan berkelanjutan. Misalnya,

pada segi pendidikan, memberikan pendidikan, pelatihan serta pendampingan terhadap kelompok masyarakat miskin. Pada segi kesehatan, meningkatkan sarana dan kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan. Pada segi ekonomi, membangun keterampilan usaha, penggunaan teknologi, dan perluasan kesempatan kerja. Pada sisi budaya dan struktural politik, perubahan terhadap budaya masyarakat yang statis ke arah budaya yang progresif, serta perbaikan terhadap tata kelola kelembagaan yang responsif dan akuntabilitas yang tinggi. Dengan demikian, berbagai pendekatan diperlukan untuk mengintegrasikan faktor-faktor yang menjadi penyebab kemiskinan sehingga strategi kebijakan pengentasan kemiskinan dapat bersifat kontinu, dan tidak bersifat temporer.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan tantangan dalam upaya pengentasan kemiskinan di desa. Hasil penelitian, harapannya dapat memberikan wawasan kepada publik umumnya serta dapat menjadi rekomendasi dan langkah perbaikan khususnya kepada pemangku kebijakan sehingga kedepannya kemiskinan di desa dapat teratasi.

Metode Penelitian

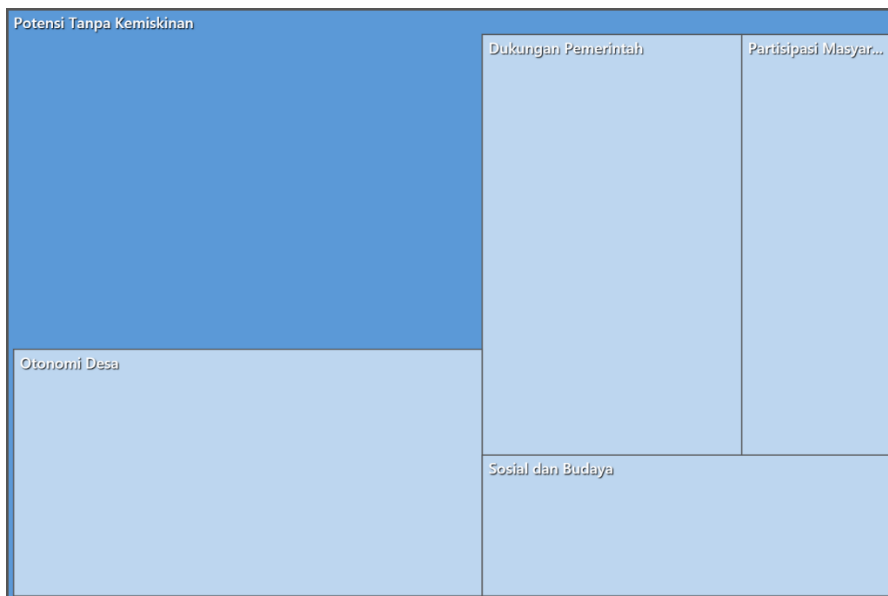
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kepustakaan (Library Research). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencari data yang sumber utamanya dari website kemendesa.go.id, kemudian memasukkan kata kunci "kemiskinan" untuk memperoleh artikel yang berkaitan dengan topik yang diangkat. Adapun data pendukungnya bersumber dari buku, dokumen, artikel, jurnal, dan lain-lain yang berkaitan. Penelitian ini menggunakan variabel potensi dan tantangan yang berkaitan dalam upaya pengentasan kemiskinan di desa. Pertama, faktor potensi yang digunakan adalah faktor dukungan pemerintah, otonomi desa, sosial dan budaya, serta partisipasi. Kedua, faktor tantangan yang ditinjau dari faktor Birokrasi, Regulasi, Infrastruktur, dan Sumber Daya Manusia (SDM). Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah metode analisis isi (*Content Analysis*) yang diolah menggunakan software Nvivo 12 plus. Analisis ini dapat digunakan untuk memperoleh hasil kesimpulan yang valid berdasarkan data hasil analisis serta dapat ditinjau kembali sesuai dengan konteks/topik yang dibahas. Adapun langkah-langkah dalam penelitian dilakukan sebagai berikut: (a) menentukan objek penelitian; (b) menentukan kategori/variabel yang akan diteliti; (c) menentukan unit analisis; (d) membuat kerangka coding; (e) mengkode data (f) menganalisis data; dan (g) menyimpulkan hasil penelitian.

Hasil Dan Pembahasan

a. Analisis Potensi Pengentasan Kemiskinan di Desa

Berikut ini menjelaskan hasil analisis dari data artikel terkait potensi pengentasan kemiskinan di desa yang ditinjau dari faktor dukungan pemerintah, otonomi desa, sosial dan budaya, dan partisipasi. Salah satu fungsi yang dapat dianalisis pada Nvivo 12, yaitu fitur *Hierarki Chart*. *Hierarki Chart* atau diagram hierarki adalah diagram yang menampilkan data hierarkis dalam bentuk persegi panjang dengan berbagai ukuran. Dari perbedaan ukuran tersebut, ditentukan dengan jumlah coding pada node berdasarkan

jumlah referensi yang diinput. Rentang terluas ditampilkan di kiri atas grafik dan rentang terkecil dtampilkan di kanan bawah grafik. Maka, diketahui dominasi terkait faktor potensi terhadap jumlah koding pada refensi yang diinput. Gambar berikut menampilkan hasil analisis data melalui fitur *Hierarki Chart*.



Gambar 1. Hierarki Chart Analisis Data Faktor Potensi

Berdasarkan hasil analisis diatas, menunjukkan bahwa otonomi desa merupakan faktor yang lebih dominan muncul dari artikel yang dikumpulkan. Dari hasil tersebut, menggambarkan bahwa potensi yang berpengaruh paling besar dalam upaya pengentasan kemiskinan di desa adalah faktor otonomi desa. Hadirnya otonomi desa dapat memberikan pengaruh dan menjadikan masyarakat pedesaan memiliki ruang gerak tersendiri yang memungkinkan mereka dapat mengatasi kemiskinannya.

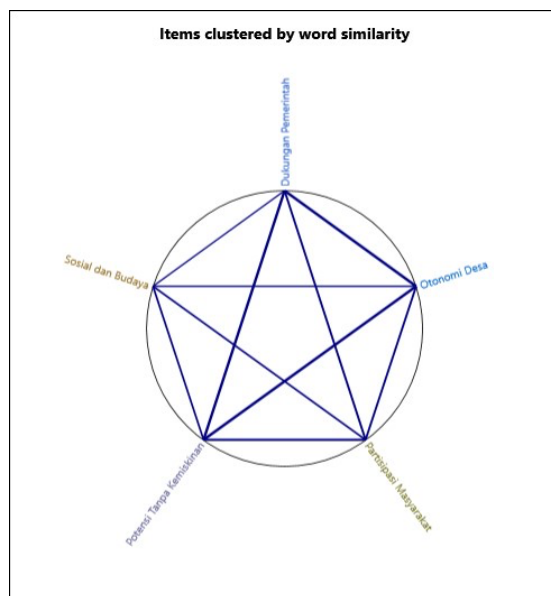
Faktor kedua, yaitu dukungan pemerintah. Faktor dukungan pemerintah dapat memberikan peluang bagi masyarakat agar dapat menciptakan ragam inovasi dan kreatifitas yang dapat menunjang produktivitas kelompok masyarakat miskin. Dengan kata lain, pemerintah harus bertindak sebagai regulator sekaligus fasilitator, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi terhadap kelompok masyarakat miskin yang diimplementasikan melalui kebijakan dan program.

Faktor ketiga, berkaitan dengan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu yang menjadi tolok ukur keberhasilan dalam pengentasan kemiskinan. Dalam hal ini masyarakat harus diberikan ruang dan kesempatan untuk berpartisipasi sehingga masyarakat dapat berperan tidak hanya sebagai objek, melainkan dapat berperan sebagai subyek dalam setiap proses pengentasan kemiskinan di desa.

Faktor potensi keempat, yaitu upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan berdasarkan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Hal tersebut, dikarenakan adanya keanekaragaman budaya (multikultur) dan kearifan local (local wisdom). Oleh karena itu, kebijakan yang terapkan di setiap daerah tidak selalu bersifat sama, akan tetapi harus disesuaikan dengan kondisi dan kebiasaan masyarakat setempat.

Selanjutnya, untuk mengetahui adanya korelasi pada keempat faktor tersebut digunakan fitur *Cluster Analysis*.

Cluster Analysis (analisis klaster) digunakan untuk mengetahui adanya korelasi atau hubungan berdasarkan hasil koding pada data diinput. Hasil koding pada data tersebut akan menampilkan perbedaan tingkat kekuatan korelasi pada masing-masing faktor yang berkorelasi sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut ini.



Gambar 2. Cluster Analysis Korelasi Potensi

Berdasarkan gambar diatas, menunjukkan adanya korelasi dari keempat faktor potensi tersebut. Korelasi dari keempat faktor tersebut saling memberikan pengaruh satu dengan yang lainnya sehingga dapat mendukung untuk memecahkan persoalan kemiskinan di desa. Di sisi lain, dari hasil analisis data didapatkan adanya korelasi kuat antara faktor otonomi desa dengan dukungan pemerintah.

Dibawah ini akan menampilkan perbedaan tingkat kekuatan korelasi pada masing-masing faktor yang ditunjukkan dalam jumlah nilai sehingga dapat diketahui korelasi yang paling tinggi pada data yang dianalisis. Nilai hasil korelasi tersebut ditunjukkan pada Tabel berikut.

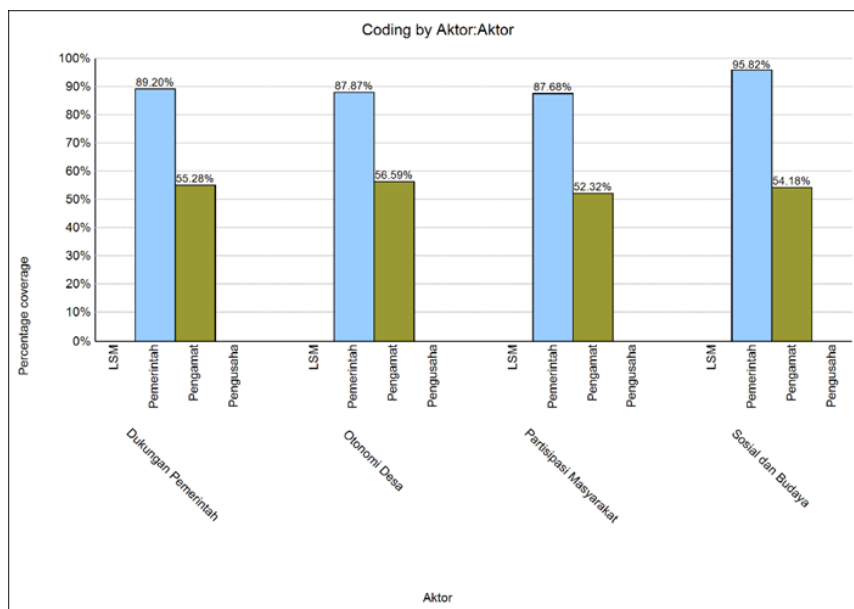
Tabel 1. Clustered Analysis Korelasi Potensi

Code A	Code B	Pearson Correlation Coeffisient
Nodes\\Otonomi Desa	Nodes\\Dukungan Pemerintah	0.97951
Nodes\\Potensi Tanpa Kemiskinan	Nodes\\Dukungan Pemerintah	0.971741
Nodes\\Potensi Tanpa Kemiskinan	Nodes\\Otonomi Desa	0.962105
Nodes\\Potensi Tanpa Kemiskinan	Nodes\\Partispasi Masyarakat	0.811199
Nodes\\Partisipasi Masyarakat	Nodes\\Dukungan Pemerintah	0.766201
Nodes\\Partisipasi Masyarakat	Nodes\\Otonomi Desa	0.74357
Nodes\\Sosial dan Budaya	Nodes\\Potensi Tanpa Kemiskinan	0.686303
Nodes\\Sosial dan Budaya	Nodes\\Partispasi Masyarakat	0.676947

Nodes\\Sosial dan Budaya	Nodes\\Otonomi Desa	0.543918
Nodes\\Sosial dan Budaya	Nodes\\Dukungan Pemerintah	0.523864

Dihat pada tabel tersebut, menuntukkan nilai *Pearson Correlation Coeffisien* pada otonomi desa dengan dukungan pemerintah adalah 0.97951, menunjukkan bahwa korelasi antara kedua faktor tersebut sangat kuat dan begitu juga dengan faktor yang lainnya menunjukkan korelasi kuat yang artinya, nilai *Pearson correlation coefficient* di atas 0,5. Sedangkan jika nilai korelasi kurang dari 0.5 berarti korelasi antara keduanya menunjukkan tingkat koresi yang lemah.

Pada gambar dibawah ini, menampilkan *Hierarki Chart* yang menunjukkan dominasi keterlibatan aktor pada faktor potensi berdasarkan banyaknya koding pada sumber data. Adapun aktor yang terlibat diantaranya adalah Pemerintah, Pengamat, Pengusaha, dan LSM. Hasilnya dapat ditunjukkan pada gambar 3 dibawah ini.



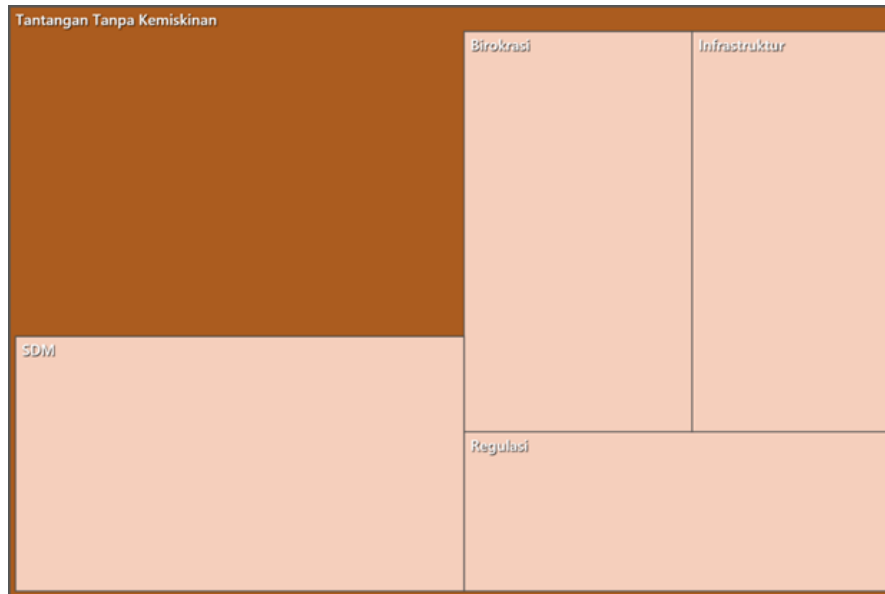
Gambar 3. Hierarki Chart Keterlibatan Aktor

Berdasarkan gambar di atas, bahwa aktor pemerintah dan pengamat merupakan aktor yang paling banyak berpengaruh dan teribat dalam upaya pengentasan kemiskinan di desa. Hal ini terlihat pada keterlibatan pada keempat faktor potensi di atas. Aktor pemerintah dalam hal ini menunjukkan tingkat keterlibatan yang tinggi dengan presentase rata-rata sebanyak 90.14%. sedangkan keterlibatan aktor pengamat pada keempat faktor potensi, yaitu rata-rata presentasenya sebanyak 55.59%. Adapun aktor LSM dan pengusaha tidak banyak berpegaruh dan terlibat dalam mengatasi kemiskinan di desa. Dengan demikian, keterlibatan dari semua unsur menjadi sangat penting dan diperlukan untuk ikut berperan dan berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada di desa.

b. Analisis Tantangan Pengentasan Kemiskinan di Desa

Tantangan dalam upaya pengentasan di desa dapat ditinjau dari beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu diantaranya faktor Birokrasi, Regulasi, Infrastruktur, dan Sumber

Daya Manusia (SDM). Berikut hasil analisis terhadap faktor tantangan yang tunjukkan pada Hierarki chart melalui gambar 4 dibawah berikut.



Gambar 4. Hierarki Chart Analisis Data Faktor Tantangan

Berdasarkan gambar di atas, hasil analisis data menunjukkan bahwa faktor sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor yang lebih dominan muncul sehingga Hasil tersebut menggambarkan bahwa faktor SDM menjadi tantangan yang berpengaruh paling besar dalam upaya pengentasan kemiskinan di desa. Kurangnya kualitas sumber daya manusia dapat menjadikan masyarakat tidak dapat berkembang dan mandiri. Oleh karena itu, pengembangan SDM khususnya masyarakat miskin ini menjadi sangat penting untuk dilakukan dengan penerapan model strategi pemberdayaan kelompok masyarakat miskin. Pemberdayaan merujuk pada upaya peningkatan kapasitas serta kualitas masyarakat agar masyarakat memiliki kemandirian, otonomi serta otoritas dalam usaha mengurangi tingkat kemiskinannya sendiri. Oleh karena itu, proses pemberdayaan masyarakat miskin bertujuan untuk melakukan transformasi atau perubahan sosial dari masyarakat yang awalnya tidak berdaya menjadi masyarakat yang berdaya, kemudian menuju masyarakat yang mandiri, dan mewujudkan masyarakat yang madani.

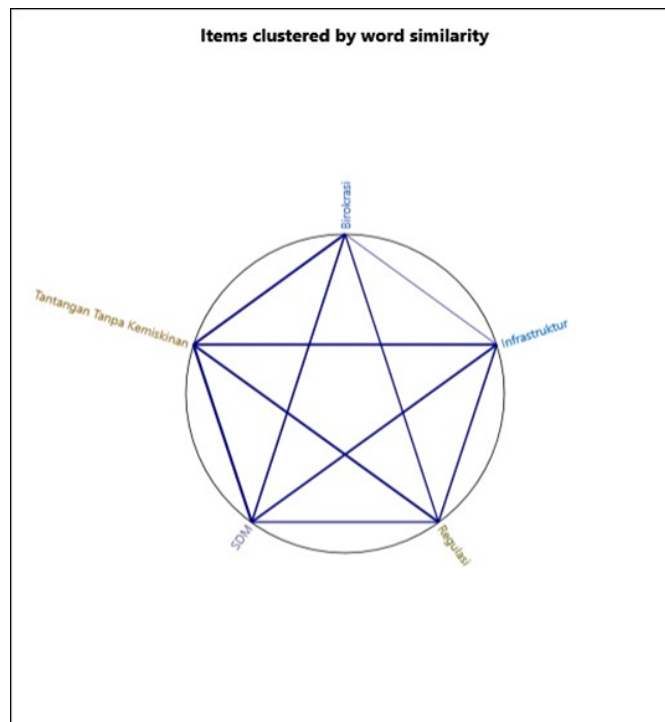
Tantangan kedua adalah faktor birokrasi. Tantangan birokrasi menjadi hambatan dalam penanggulangan kemiskinan di desa karena perilaku birokrasi seringkali memposisikan dirinya sebagai penguasa. Birokrasi seharusnya bertindak sebagai katalisator, fasilitator, dan dinamisator terhadap kelompok masyarakat miskin sehingga melalui fungsi tersebut, birokrasi dapat melatih dan menumbuhkan kemampuan masyarakat miskin dalam program pembangunan.

Tantangan Ketiga, menunjukkan pada faktor regulasi. Regulasi atau kebijakan yang seringkali tumpang tindih dapat menjadikan kurangnya efektifitas dan efisien dalam pengimplementasiannya. Dalam perumusan kebijakan, seharusnya dibuat dengan tujuan yang jelas dan spesifik agar proses pencapaiannya dapat terarah. Perumusan kebijakan dalam konteks penganggulungan kemiskinan di desa juga memerlukan analisis secara

komprehensif dan memperhatikan tahap-tahap yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi kemiskinan yang ada di desa.

Terakhir, yaitu tantangan dari faktor infrastruktur. Ketersediaan infrastuktur sangat sulit ditemukan di wilayah pedesaan. Hal tersebut, banyak dialami oleh masyarakat pedesaan karena keterbatasan bahkan sulitnya akses mereka terhadap infrastruktur seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan sebagainya. Maka dari itu, perlu adanya perbaikan akses terhadap infrastruktur yang menunjang peningkatan keterampilan dasar masyarakat miskin untuk meningkatkan produktifitas mereka.

Selanjutnya, pada gambar 5 dibawah ini merupakan hasil *Cluster Analysis* yang menunjukkan korelasi pada keempat faktor tantangan dalam pengentasan kemiskinan di desa.



Gambar 5. Cluster Analysis Korelasi Tantangan

Pada gambar 5 diatas, menunjukkan adanya korelasi dari keempat faktor tantangan dalam upaya pengentasan kemiskinan di desa. Artinya, keempat faktor tantangan tersebut memberikan pengaruh serta hambatan dalam upaya pengentasan kemiskinan di desa. Maka, adanya korelasi terhadap keempat faktor tantangan tersebut dapat menjadi sarana yang harus diperbaiki sebagai langkah yang dapat menunjang upaya pengentasan kemiskinan di desa. sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.

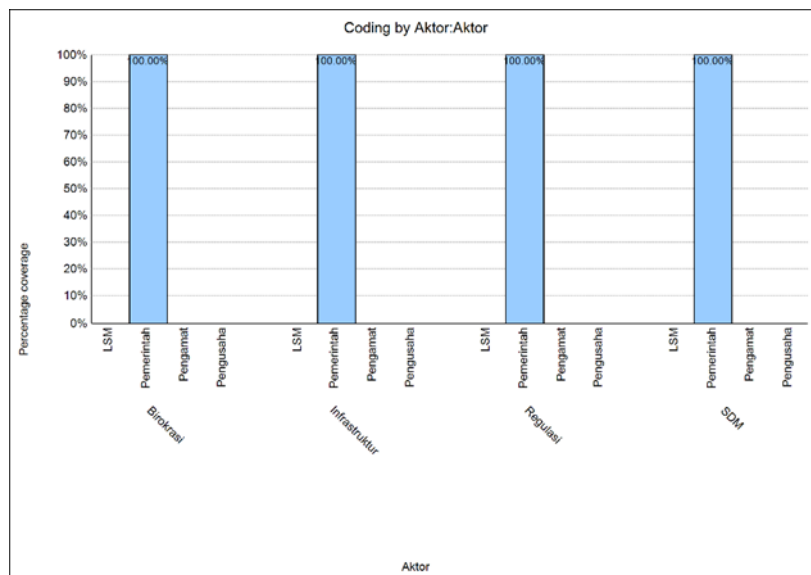
Berikutnya, korelasi dari keempat faktor tantangan tersebut memiliki nilai koefisien yang berbeda sehingga terlihat bahwa keempat faktor potensi menampilkan perbedaan tingkat kekuatan korelasi pada masing-masing faktor. Tabel dibawah ini menunjukkan nilai hasil korelasi terhadap keempat faktot tantangan.

Tabel 2. Clustered Analysis Korelasi Potensi

Code A	Code V	Pearson Correlation Coeffisien
Nodes\\Tantangan Tanpa Kemiskinan	Nodes\\SDM	0.85185
Nodes\\Tantangan Tanpa Kemiskinan	Nodes\\Birokrasi	0.789625
Nodes\\Tantangan Tanpa Kemiskinan	Nodes\\Regulasi	0.76306
Nodes\\Tantangan Tanpa Kemiskinan	Nodes\\Infrastruktur	0.729416
Nodes\\SDM	Nodes\\Infrastruktur	0.706102
Nodes\\SDM	Nodes\\Birokrasi	0.646266
Nodes\\Regulasi	Nodes\\Infrastruktur	0.601478
Nodes\\Regulasi	Nodes\\Birokrasi	0.522992
Nodes\\SDM	Nodes\\Regulasi	0.487441
Nodes\\Infrastruktur	Nodes\\Birokrasi	0.254284

Pada tabel 2 diatas, menunjukkan *Pearson correlation coefficient* pada Tantangan tanpa kemiskinan memiliki tingkat korelasi yang kuat dengan faktor SDM, yaitu 0.85185 dan korelasi kuat juga terlihat sampai pada korelasi antara faktor Regulasi dengan Birokrasi yang pearsonnya sebesar 0.522992. Sedangkan yang memiliki nilai dibawah 0.5 didapatkan antara faktor SDM dengan Birokrasi dan faktor Infrastruktur dengan Birokrasi sehingga hal ini menunjukkan tingkat korelasi yang lemah.

Berikut ini menjelaskan hasil analisis terhadap keterlibatan aktor dalam upaya pengentasan kemiskinan ditinjau dari faktor tantangan yang ditunjukkan pada *Hierarki Chart* melalui gambar 3 di bawah ini.



Gambar 6. Hierarki Chart Keterlibatan Aktor

Berdasarkan gambar diatas, dari hasil analisis data didapatkan bahwa pemerintah merupakan aktor yang paling mendominasi dari keempat aktor yang terlibat terhadap keempat faktor tantangan diatas dengan presentase sebanyak 100%. Sementara, aktor LSM, Pengamat, dan Pengusaha kurang berperan dalam upaya menjawab tantangan kemiskinan. Dari ketiga aktor tersebut, seharusnya perlu ikut mengambil peran dan berkontribusi dalam

menjawab persoalan yang menjadi tantangan dalam pengentasan kemiskinan di desa.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa potensi yang paling dominan berpengaruh dalam upaya pengentasan kemiskinan di desa adalah faktor otonomi desa. Sedangkan pada faktor tantangan, faktor SDM merupakan faktor yang paling dominan memberikan pengaruh pada upaya pengentasan kemiskinan di desa.

Dari masing-masing keempat faktor, baik pada potensi maupun tantangan menunjukkan adanya korelasi satu sama lainnya, hanya saja menunjukkan perbedaan yang terletak pada nilai koefisien masing-masing faktor yang berkorelasi sehingga menghasilkan tingkat korelasi yang kuat dan korelasi lemah. Di samping itu, korelasi pada faktor potensi tersebut dapat saling mendukung dalam memecahkan persoalan kemiskinan di desa. Begitu pun pada faktor tantangan yang berkorelasi, seharusnya dapat menjadi sarana yang harus diperbaiki sebagai langkah yang dapat menunjang upaya pengentasan kemiskinan di desa.

Hasil penelitian juga menunjukkan ketelibatan aktor, diantaranya adalah LSM, Pemerintah, Pengamat, dan Pengusaha. Pada faktor potensi, pemerintah dan pengamat merupakan aktor yang paling berdominasi dalam pengentasan kemiskinan di desa, sedangkan aktor LSM dan pengusaha tidak menunjukkan peran dalam menjawab persoalan kemiskinan. Ditinjau dari faktor tantangan, hanya pemerintah yang berdominasi, sedangkan ketiga aktor lainnya tidak menunjukkan peran dalam upaya menjawab persoalan kemiskinan.

Saran

Sebagaimana telah diuraikan diatas, pencegahan masalah kemiskinan sehingga tidak menjadi masalah yang berkepanjangan, maka untuk menunjang upaya penanggulangan kemiskinan di semua wilayah pedesaan dilakukan dengan mendekatkan program sifatnya multisektoral, berkelanjutan, terpadu, konprehensif, dan konsisten. Tujuannya, yaitu mengedepankan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sehingga dapat keluar dari lingkaran setan kemiskinan. Dengan demikian, penelitian ini harapannya dapat dijadikan sebagai rekomendasi diantaranya sebagai berikut.

- a. Pemberdayaan secara masif terhadap kelompok masyarakat miskin. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas serta kualitas agar masyarakat memiliki kemandirian, otonomi serta otoritas dalam usaha mengurangi tingkat kemiskinannya sendiri. Maka, masyarakat harus difasilitasi dalam bentuk pemberian pendidikan, pelatihan, serta pendampingan secara masif terhadap masyarakat desa. Di samping itu, untuk dapat menunjang produktifitas masyarakat, juga diperlukan kemudahan untuk memperoleh akses terhadap pasar, akses modal, dan akses teknologi.
- b. Penguatan integrasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan. Dalam menunjang keberhasilan pengentasan kemiskinan di desa, maka sangat diperlukan tingkat integrasi dan kerja sama baik antar pemerintah maupun dengan pihak non pemerintah seperti perguruan tinggi, pengusaha/swasta, organisasi sosial dan keagamaan beserta masyarakat desa itu sendiri dalam merespon persoalan kemiskinan sehingga

keterlibatan semua unsur tersebut dapat menjadi kekuatan yang saling mendukung satu sama lainnya.

- c. Penguatan otonomi desa. Penguatan otonomi desa dimaksudkan untuk memperbaiki basis kehidupan masyarakat baik dalam sektor ekonomi, sosial, budaya, maupun politik desa. oleh karena itu, penguatan otonomi desa tentunya diperlukan strategi yang mampu mengoptimalisasi potensi sumber daya lokal desa sehingga dapat menjadikan program pengentasan kemiskinan lebih realistis, tepat sasaran, berkelanjutan dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Amalia, A. D. (2015). MODAL SOSIAL DAN KEMISKINAN. *Sosio Informa*, 1(3), 310–323. <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/download/166/108>
- Annur, R. A. (2013). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI KECAMATAN JEKULO DAN MEJOBLO KABUPATEN KUDUS TAHUN 2013. *Economics Development Analysis Journal*, 2(4), 409–426. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj/article/view/3209>
- Badan Pusat Statistik. (2022). Profil Kemiskinan di Indonesia September 2021. In *Berita Resmi Statistik* (Vol. 07, Issue 01).
- Bhinadi, A. (2017). *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=b8hEDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR10&dq=info:mSmDmrHfHLtwJ:scholar.google.com&ots=XnZ7dZ9y4U&sig=9xCNPseD7wfadwxqkLnTtUMV7so&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Dewi, N. (2017). PENGARUH KEMISKINAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI RIAU. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, 4(1), 870–882. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/12917/12559>
- Iskandar, S., Mahmud, A., & Muslim, M. (2010). KARAKTERISTIK DAN AKAR MASALAH KEMISKINAN Kasus Pada 4 Tipologi Desa di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(1), 122–134. <https://doi.org/10.23917/jep.v11i1.338>
- Itang. (2015). Faktor Faktor Penyebab Kemiskinan. *TAZKIYA: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, 16(1), 1–30. <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/206/208>
- Murdiyana, & Mulyana. (2017). ANALISIS KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA. *Jurnal Politik Pemerintahan*, 10(1), 73–96. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.384>
- Prawoto, N. (2009). MEMAHAMI KEMISKINAN DAN STRATEGI PENANGGULANGANNYA. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 9(1), 56–68. <https://journal.ums.ac.id/index.php/esp/article/view/1530/1578>
- Yacoub, Y. (2012). Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal EKSOS*, 8(3), 176–185. [http://riset.polnep.ac.id/bo/upload/penelitian/penerbitan_jurnal/06-eksos 4 yarlina okt12.pdf](http://riset.polnep.ac.id/bo/upload/penelitian/penerbitan_jurnal/06-eksos%204%20yarlina%20okt12.pdf)